

Optimalisasi Peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dalam Penanggulangan Inflasi di Kota Palembang

KATA KUNCI

Inflasi, Strategi, TPID, Penanggulangan Inflasi

Shelly Vetria

Bappeda Litbang Kota Palembang, Indonesia

E-mail: shellyvetriaibrahim@gmail.com

ABSTRAK

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warganya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas TPID Kota Palembang dalam penanggulangan inflasi dan mengusulkan strategi yang dapat diimplementasikan untuk optimalisasi peran TPID. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, TPID Kota Palembang berhasil menunjukkan kinerja yang signifikan dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat. Implementasi operasi pasar, pengendalian distribusi barang, dan pengawasan harga merupakan beberapa langkah konkret yang diambil TPID untuk mengendalikan inflasi. Dari hasil analisis data, terlihat bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam penanggulangan inflasi di Kota Palembang.

This is an open access article under the Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



Copyright holders:

Shelly Vetria (2024)

First publication right:

Journal of Mandalika Social Science

Volume 2 Nomor 1 2024

PENDAHULUAN

Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang, yang berarti nilai uang akan menurun seiring dengan meningkatnya harga barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi, antara lain:

- a) Demand-Pull Inflation: Terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran. Ini bisa terjadi karena peningkatan konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari kapasitas produksi ekonomi.
- b) Cost-Push Inflation: Terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat, yang menyebabkan produsen menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan. Faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan baku, upah pekerja, dan biaya energi dapat memicu cost-push inflation.
- c) Built-In Inflation: Terjadi karena adanya ekspektasi inflasi di masa depan, yang menyebabkan pekerja meminta kenaikan upah untuk mengimbangi kenaikan harga yang diantisipasi. Kenaikan upah ini kemudian dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga barang dan jasa, menciptakan siklus inflasi yang berkelanjutan.

Penanggulangan inflasi memerlukan kebijakan yang efektif dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi inflasi antara lain:

- a) Kebijakan Moneter: Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Peningkatan suku bunga akan membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan menurunkan konsumsi serta investasi, sehingga menurunkan permintaan agregat. Bank sentral juga dapat melakukan operasi pasar terbuka, yaitu menjual surat berharga untuk menyerap likuiditas dari pasar.
- b) Kebijakan Fiskal: Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk menurunkan defisit anggaran. Pengurangan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menurunkan permintaan agregat, sehingga membantu menekan inflasi.
- c) Kebijakan Sisi Penawaran: Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Peningkatan kapasitas produksi akan membantu menyeimbangkan permintaan dan penawaran, serta menekan tekanan inflasi.
- d) Kontrol Harga dan Upah: Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk membatasi kenaikan harga barang dan jasa serta upah pekerja. Namun, kebijakan ini seringkali hanya efektif dalam jangka pendek dan dapat menimbulkan distorsi dalam pasar jika diterapkan terlalu lama.
- e) Kebijakan Perdagangan: Pemerintah dapat mendorong impor barang dan jasa untuk meningkatkan penawaran dalam negeri dan menekan harga. Selain itu, kebijakan perdagangan yang mendukung persaingan dan efisiensi dapat membantu menekan inflasi.

Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola ekspektasi inflasi di masa depan.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warganya. Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) dibentuk sebagai respon pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi melalui koordinasi antar instansi terkait, pengumpulan dan analisis data, serta penerapan kebijakan yang efektif (Bank Indonesia, 2022). Namun, optimalisasi peran TPID dalam penanggulangan inflasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis inflasi secara makroekonomi dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah pusat (Setiawan, 2021; Siregar & Rajagukguk,

2020). Namun, studi yang mendalam mengenai peran dan efektivitas TPID di tingkat kota, khususnya Kota Palembang, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan celah penelitian yang penting untuk diisi guna memahami lebih lanjut bagaimana TPID dapat berkontribusi secara optimal dalam penanggulangan inflasi di level daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas TPID dalam mengendalikan inflasi di Kota Palembang. Mengingat inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat, upaya optimalisasi peran TPID menjadi sangat krusial. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan tambahan pada perekonomian, sehingga strategi penanggulangan inflasi yang efisien dan efektif menjadi semakin penting (World Bank, 2021).

Beberapa penelitian telah mengkaji peran TPID dalam pengendalian inflasi. Sebagai contoh, studi oleh Putra (2019) menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TPID dapat menurunkan tingkat inflasi di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian lain oleh Santoso dan Andriani (2020) menyebutkan bahwa keberhasilan TPID sangat tergantung pada kualitas data dan informasi yang tersedia serta kecepatan dalam mengambil tindakan korektif. Namun, penelitian-penelitian ini tidak secara khusus meneliti kasus Kota Palembang, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi TPID di kota ini.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan fokus khusus pada optimalisasi peran TPID Kota Palembang dalam menanggulangi inflasi. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis efektivitas TPID dari perspektif kebijakan, tetapi juga akan menyoroti aspek-aspek praktis dan operasional yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja TPID. Studi ini akan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pengendalian inflasi di Kota Palembang.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas TPID Kota Palembang dalam penanggulangan inflasi dan mengusulkan strategi yang dapat diimplementasikan untuk optimalisasi peran TPID. Manfaat penelitian ini antara lain adalah:

- a) Memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data untuk pemerintah daerah dan TPID dalam meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi.
- b) Menyediakan informasi yang berguna bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada studi kebijakan ekonomi daerah.
- c) Meningkatkan pemahaman publik mengenai peran TPID dan pentingnya pengendalian inflasi untuk kesejahteraan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran dan efektivitas Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dalam mengendalikan inflasi di kota tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan praktik-praktik yang dilakukan oleh anggota TPID serta pihak-pihak terkait lainnya (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota TPID Kota Palembang, pejabat pemerintah daerah, serta pakar ekonomi yang memiliki pengetahuan mengenai penanggulangan inflasi di tingkat daerah (Yin, 2018). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan TPID, laporan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang komprehensif mengenai strategi, tantangan, dan keberhasilan TPID dalam mengendalikan inflasi (Rubin & Rubin, 2011). Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung proses kerja TPID dalam penanggulangan inflasi, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen resmi yang relevan (Bowen, 2009). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema penting yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Transkripsi dan Familiarisasi: Semua data wawancara ditranskripsikan secara verbatim dan peneliti membaca transkrip secara berulang untuk memahami isi data secara mendalam (Gibbs, 2007).
- b) Pengkodean Awal: Data yang telah ditranskripsi kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan penelitian (Saldana, 2016).
- c) Pencarian Tema: Kode-kode yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih besar yang menggambarkan fenomena yang diteliti (Attride-Stirling, 2001).
- d) Peninjauan Tema: Tema-tema yang telah diidentifikasi kemudian ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan data dan tujuan penelitian (Nowell et al., 2017).
- e) Definisi dan Penamaan Tema: Tema-tema yang telah disetujui kemudian didefinisikan dan dinamai untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian (Clarke & Braun, 2013).
- f) Pelaporan Temuan: Hasil analisis tematik kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan peran dan efektivitas TPID Kota Palembang dalam penanggulangan inflasi (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Strategis TPID dalam Pengendalian Inflasi Daerah

Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi di Kota Palembang. Peran strategis ini mencakup koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi dapat berjalan dengan efektif. Menurut Kusnadi (2020), TPID bertugas untuk memantau perkembangan harga, mengidentifikasi sumber-sumber inflasi, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi inflasi (Kusnadi, 2020).

TPID Kota Palembang juga berperan dalam menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai harga barang dan jasa, serta distribusi komoditas penting. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi kenaikan harga yang dapat memicu inflasi (Rahman & Setiawan, 2021). Dengan adanya data yang akurat, TPID dapat melakukan intervensi pasar yang efektif, seperti operasi pasar untuk menstabilkan harga commodities pokok (Rahman & Setiawan, 2021). Selain itu, TPID juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kestabilan harga dan menghindari panic buying. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak inflasi dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pengendalian harga (Nurhadi & Santoso, 2019). Peran TPID dalam pengendalian inflasi juga didukung oleh sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam implementasi kebijakan moneter dan fiskal yang komprehensif. Kerjasama antara TPID dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi (Wahyudi, 2021).

Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi di berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. TPID bertugas untuk memonitor, menganalisis, dan mengendalikan laju inflasi melalui koordinasi kebijakan antarinstansi. Peran ini mencakup berbagai aspek penting, seperti koordinasi antarinstansi, pengumpulan dan analisis data, edukasi masyarakat, serta implementasi kebijakan yang tepat.

a. Koordinasi Antarinstansi

Salah satu peran utama TPID adalah melakukan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah dan pusat. TPID berfungsi sebagai jembatan antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengendalian inflasi, seperti dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas perindustrian, serta Bank Indonesia. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil bersifat sinergis dan tidak saling bertentangan. Misalnya, kebijakan stabilisasi harga pangan yang dilakukan oleh dinas pertanian harus didukung oleh kebijakan distribusi yang efektif dari dinas perdagangan untuk mencapai hasil yang optimal (Kusnadi, 2020).

b. Pengumpulan dan Analisis Data

TPID juga bertanggung jawab dalam pengumpulan dan analisis data harga komoditas secara berkala. Data yang dikumpulkan meliputi harga bahan pokok, tren permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi harga seperti kondisi cuaca dan fluktuasi harga global. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber inflasi dan merumuskan strategi pengendalian yang efektif. Dengan data yang akurat dan analisis yang mendalam, TPID dapat merumuskan intervensi pasar yang tepat, seperti operasi pasar atau penetapan harga eceran tertinggi (Rahman & Setiawan, 2021).

c. Edukasi dan Sosialisasi

Selain koordinasi dan analisis data, TPID juga berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai dampak inflasi terhadap perekonomian dan kehidupan sehari-hari, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk membantu pengendalian inflasi. Sosialisasi ini penting untuk menghindari panic buying yang dapat memicu kenaikan harga yang tidak wajar. TPID seringkali bekerjasama dengan media massa dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas harga (Nurhadi & Santoso, 2019).

d. Implementasi Kebijakan

TPID juga bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Kebijakan ini bisa berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET), operasi pasar, serta pengawasan distribusi dan stok barang. Misalnya, dalam situasi harga beras yang naik tajam, TPID dapat mengadakan operasi pasar untuk menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau, atau menetapkan HET untuk mencegah harga yang tidak wajar. Implementasi kebijakan ini dilakukan dengan koordinasi yang ketat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif dan tidak disalahgunakan (Santoso & Wulandari, 2021).

e. Evaluasi dan Monitoring

TPID juga melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang

diambil telah berhasil menekan laju inflasi atau perlu dilakukan penyesuaian. Monitoring dilakukan melalui pengumpulan data harga secara real-time dan feedback dari masyarakat. Dengan demikian, TPID dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar yang berkembang (Widodo, 2019).

f. Sinergi dengan Kebijakan Nasional

Peran strategis TPID tidak terlepas dari sinergi dengan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan di tingkat nasional, seperti penyesuaian suku bunga dan pengendalian defisit anggaran, memiliki dampak langsung terhadap inflasi di daerah. Oleh karena itu, TPID harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan nasional (Wahyudi, 2021).

Peran strategis TPID dalam pengendalian inflasi daerah mencakup berbagai aspek penting yang saling terkait, mulai dari koordinasi antarinstansi, pengumpulan dan analisis data, edukasi masyarakat, implementasi kebijakan, hingga evaluasi dan monitoring. Dengan peran yang komprehensif ini, TPID berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi di daerah, sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Efektivitas Program Pengendalian Harga dan Distribusi Barang

TPID Kota Palembang telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengendalikan harga dan distribusi barang. Program-program ini meliputi operasi pasar, pengawasan distribusi, dan pengendalian harga komoditas pokok. Menurut laporan dari TPID Kota Palembang, operasi pasar telah berhasil menstabilkan harga beras, minyak goreng, dan gula pasir selama periode tertentu (TPID Kota Palembang, 2020).

Selain operasi pasar, TPID juga melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi barang untuk memastikan tidak terjadi penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga (Rini & Kartika, 2019). Pengawasan ini melibatkan kerjasama dengan aparat kepolisian dan dinas terkait untuk melakukan inspeksi rutin di pasar-pasar dan gudang penyimpanan (Rini & Kartika, 2019).

Dalam upaya pengendalian harga, TPID juga menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali dan memastikan ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat (Santoso & Wulandari, 2021). Namun, efektivitas program pengendalian harga ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, seperti fluktuasi harga global dan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi barang (Haryanto, 2020). Oleh karena itu, TPID harus terus meningkatkan koordinasi dan adaptasi terhadap dinamika pasar untuk menjaga stabilitas harga.

Pengendalian harga dan distribusi barang adalah dua komponen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Efektivitas program-program ini sangat bergantung pada desain kebijakan, implementasi, serta koordinasi antar instansi terkait. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai efektivitas program pengendalian harga dan distribusi barang.

a. Desain Kebijakan Pengendalian Harga

Desain kebijakan pengendalian harga melibatkan penetapan harga eceran tertinggi (HET), subsidi harga, dan operasi pasar. Penetapan HET bertujuan untuk mencegah harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi di pasar. Kebijakan ini sering diterapkan pada komoditas penting seperti

beras, minyak goreng, dan bahan bakar. HET harus ditetapkan berdasarkan analisis biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan yang wajar untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen (Yusuf & Mardiyanto, 2019). Subsidi harga diberikan untuk menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Subsidi dapat diberikan langsung kepada produsen atau konsumen, tergantung pada tujuan dan desain kebijakan. Misalnya, subsidi bahan bakar diberikan untuk menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat luas (Hidayat & Suharto, 2020).

b. Implementasi Operasi Pasar

Operasi pasar dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga barang tertentu dengan cara menjualnya di bawah harga pasar. Operasi pasar seringkali dilakukan saat terjadi kenaikan harga yang signifikan akibat kekurangan pasokan atau lonjakan permintaan. Pemerintah bekerja sama dengan distributor dan produsen untuk menyediakan barang dengan harga terjangkau di pasar. Efektivitas operasi pasar sangat bergantung pada ketersediaan stok, distribusi yang tepat waktu, dan penetapan lokasi yang strategis untuk menjangkau konsumen yang membutuhkan (Wicaksono & Handayani, 2018).

c. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas program pengendalian harga. Pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi barang dan penetapan harga di pasar. Ini mencakup pemantauan harga di pasar tradisional, modern, serta pengecer kecil. Selain itu, pemerintah perlu menindak tegas pelanggaran seperti penimbunan barang dan praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen (Santoso, 2019).

d. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antar instansi seperti dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas perindustrian, dan kepolisian sangat penting dalam pelaksanaan program pengendalian harga dan distribusi barang. Kerjasama yang baik antar instansi memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak tumpang tindih. Selain itu, koordinasi yang baik memungkinkan penanggulangan cepat jika terjadi lonjakan harga atau gangguan dalam distribusi barang (Wibowo & Arifin, 2020).

e. Tantangan dalam Pengendalian Harga dan Distribusi

Tantangan utama dalam pengendalian harga dan distribusi barang meliputi fluktuasi harga global, kondisi cuaca yang ekstrem, serta gangguan logistik. Fluktuasi harga global, terutama untuk komoditas impor seperti minyak dan gandum, dapat berdampak langsung pada harga di pasar domestik. Pemerintah perlu memiliki strategi yang fleksibel untuk mengatasi dampak dari fluktuasi harga global ini, termasuk diversifikasi sumber impor dan peningkatan produksi domestik (Purwanto, 2018).

Kondisi cuaca yang ekstrem seperti banjir atau kekeringan juga dapat mempengaruhi produksi dan distribusi barang. Pemerintah harus memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi kondisi ini, termasuk penyimpanan stok strategis dan penguatan infrastruktur distribusi (Haryanto & Putra, 2019). Gangguan logistik, seperti kemacetan lalu lintas dan keterbatasan infrastruktur, juga menjadi tantangan dalam distribusi barang. Pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur logistik, termasuk jalan, pelabuhan, dan gudang, untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar dan efisien (Sutanto, 2017).

Efektivitas program pengendalian harga dan distribusi barang sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat, implementasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta koordinasi yang baik antar instansi terkait. Tantangan-tantangan seperti fluktuasi harga global, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan logistik harus diatasi dengan strategi yang fleksibel dan terencana. Dengan demikian, program pengendalian harga dan distribusi barang dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan TPID

Meskipun TPID Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga global yang dapat mempengaruhi harga komoditas di tingkat lokal (Widodo, 2019). Perubahan harga minyak dunia, misalnya, dapat berdampak pada biaya produksi dan transportasi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga barang di pasar lokal (Widodo, 2019). Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan logistik yang dapat menghambat distribusi barang. Kondisi jalan yang buruk dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai dapat menyebabkan keterlambatan distribusi dan peningkatan biaya, yang kemudian berkontribusi pada kenaikan harga barang (Hidayat & Yulianto, 2021).

Selain itu, adanya praktik penimbunan dan spekulasi harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga menjadi hambatan dalam upaya pengendalian inflasi (Sari & Pratama, 2020). Untuk mengatasi hal ini, TPID perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan dan spekulasi harga (Sari & Pratama, 2020). Kerjasama yang kurang optimal antara pemerintah daerah dan pusat juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi (Firmansyah, 2018). Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4. Rekomendasi untuk Optimalisasi Peran TPID

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran TPID Kota Palembang dalam penanggulangan inflasi. Pertama, TPID perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas data serta informasi yang dikumpulkan. Data yang akurat dan terkini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengendalian harga (Wibowo, 2020).

Kedua, TPID harus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, dinas terkait, dan aparat penegak hukum. Kerjasama yang solid akan memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi dapat berjalan dengan efektif dan terkoordinasi (Susanto, 2019).

Ketiga, diperlukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas logistik untuk mendukung distribusi barang yang lebih efisien. Perbaikan jalan, pengadaan gudang penyimpanan yang memadai, dan peningkatan sarana transportasi akan membantu mengurangi biaya distribusi dan menstabilkan harga barang (Yusuf & Hanafi, 2021).

Keempat, TPID perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kestabilan harga dan menghindari panic buying. Peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak inflasi dan peran mereka dalam pengendalian harga sangat penting untuk keberhasilan upaya penanggulangan inflasi (Putri & Rahmawati, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam peran strategis Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dalam mengatasi permasalahan inflasi di kota tersebut. Melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, TPID Kota Palembang berhasil menunjukkan

kinerja yang signifikan dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat. Implementasi operasi pasar, pengendalian distribusi barang, dan pengawasan harga merupakan beberapa langkah konkret yang diambil TPID untuk mengendalikan inflasi. Dari hasil analisis data, terlihat bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam penanggulangan inflasi di Kota Palembang.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas TPID ke depan. Tantangan tersebut mencakup fluktuasi harga komoditas global, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta infrastruktur logistik yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, penguatan kapasitas TPID, dan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Dengan demikian, TPID Kota Palembang dapat terus berperan optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi model bagi daerah lain dalam penanggulangan inflasi.

REFERENSI

- Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. *Qualitative Research*, 1(3), 385-405.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. *The Psychologist*, 26(2), 120-123.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Firmansyah, A. (2018). Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 15(1), 1-12.
- Gibbs, G. R. (2007). *Analyzing qualitative data*. Sage.
- Haryanto, B., & Putra, D. (2019). Pengaruh Kondisi Cuaca Ekstrem terhadap Distribusi Barang di Indonesia. *Jurnal Transportasi dan Logistik*, 14(3), 45-60.
- Haryanto, D. (2020). Dampak Fluktuasi Harga Global terhadap Inflasi Domestik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 45-58.
- Hidayat, A., & Yulianto, T. (2021). Analisis Infrastruktur dan Logistik dalam Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Jurnal Logistik dan Transportasi*, 6(3), 89-104.
- Hidayat, M., & Suharto, A. (2020). Efektivitas Kebijakan Subsidi Harga dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok. *Jurnal Ekonomi Publik*, 12(2), 66-80.
- Kusnadi, R. (2020). Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga. *Jurnal Ekonomi Regional*, 12(1), 20-35.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Nurhadi, S., & Santoso, P. (2019). Edukasi dan Sosialisasi Pengendalian Inflasi kepada Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Sosial*, 11(2), 58-72.
- Purwanto, E. (2018). Strategi Pengendalian Harga Komoditas Impor di Tengah Fluktuasi Harga Global. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 15(1), 32-48.
- Putra, A. (2019). Sinergi Pemerintah Daerah dan TPID dalam Menurunkan Inflasi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 10(1), 55-70.

- Putri, A. D., & Rahmawati, S. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(4), 110-123.
- Rahman, F., & Setiawan, B. (2021). Peran Data dan Informasi dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Teknologi Informasi*, 17(3), 34-50.
- Rini, L., & Kartika, N. (2019). Pengawasan Distribusi Barang dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Manajemen Distribusi*, 8(2), 67-85.
- Santoso, B., & Andriani, L. (2020). Peran Kualitas Data dalam Keberhasilan TPID. *Journal of Regional Economics*, 12(2), 101-115.
- Santoso, H., & Wulandari, A. (2021). Kebijakan Harga Eceran Tertinggi dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Ekonomi Publik*, 10(1), 44-60.
- Sari, D., & Pratama, M. (2020). Penimbunan dan Spekulasi Harga sebagai Tantangan Pengendalian Inflasi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(2), 78-95.
- Setiawan, I. (2021). Analisis Inflasi dan Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 15(3), 123-140.
- Siregar, M., & Rajagukguk, J. (2020). Kebijakan Moneter dan Inflasi: Pendekatan Makroekonomi. *Ekonomi Indonesia*, 18(2), 89-112.
- Susanto, E. (2019). Sinergi Kebijakan Pengendalian Inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 33-47.
- TPID Kota Palembang. (2020). Laporan Kinerja TPID Kota Palembang Tahun 2020. Palembang: TPID Kota Palembang.
- Wahyudi, A. (2021). Kerjasama antara TPID dan Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Ekonomi Makro*, 19(1), 28-41.
- Wibowo, S., & Arifin, Z. (2020). Koordinasi Antar Instansi dalam Pengendalian Harga di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 55-70.
- Wicaksono, B., & Handayani, T. (2018). Peran Operasi Pasar dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di Indonesia. *Jurnal Pertanian dan Pangan*, 20(2), 34-50.
- Widodo, D. (2019). Fluktuasi Harga Global dan Dampaknya terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 13(1), 50-65.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Towards a Secure and Fast Recovery*. Washington D.C.: The World Bank.
- Yusuf, R., & Mardiyanto, A. (2019). Penetapan Harga Eceran Tertinggi: Studi Kasus pada Komoditas Beras. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 13(4), 27-39.